



PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Triwarno Atmojo
Jabatan : Kepala BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Heru Winarko, S.H
Jabatan : Kepala Badan Narkotika Nasional

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

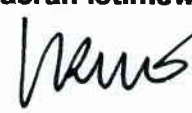
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua
Kepala Badan Narkotika Nasional


Drs. Heru Winarko, S.H

Pihak Pertama
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta


Drs. Triwarno Atmojo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya penyebaran informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7	%
Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	9	Institusi/lembaga
Terselenggaranya Pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	1	Kawasan/wilayah
Terselenggaranya Penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	26	Institusi/ Lingkungan
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	8	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	10	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi	120	Orang

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1	Jaringan
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan ganaman ganja dan Tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang diselesaikan (P21)	17	Berkas Perkara
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	-	Titik Lokasi
Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang diselesaikan (P-21)	-	Berkas Perkara
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	
	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba	100	
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja anggaran BNN	88	

No	Kegiatan	Anggaran	
1.	Penyelenggaraan Advokasi	Rp	210.000.000
2.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	881.000.000
3.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	96.931.000
4.	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp	724.746.000
5.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp	283.288.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	548.093.000
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	450.552.000
8.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp	100.000.000
9.	Pegawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp	231.290.000
10.	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp	1.262.432.000
11.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	RP	-
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	5.988.038.000
13.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	209.769.000
14.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	187.968.000
15.	Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	5.055.184.000
16.	Pengelolaan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	161.336.000
	TOTAL	Rp	16.390.627.000

Denpasar, 28 Januari 2020

Pihak Kedua
Kepala Badan Narkotika Nasional


Drs. Heru Winarko, S.H

Pihak Pertama
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta


Drs. Triwarno Atmojo